

## Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar seluruh badan publik terbuka dengan kritik dan saran dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10).

"Semua badan publik harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis," kata Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, Indonesia tegas menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini berarti, negara, pemerintah, dan badan publik wajib terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengu-

kuhan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis," ujarnya.

Ma'ruf juga berpesan agar badan publik harus menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan publik juga diharapkan selalu berpedoman pada prinsip ketertutupan dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik.

"Badan publik juga melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat merespons dengan cerdas, cepat, tepat, dan aman dalam penyediaan informasi publik dalam derasnya arus informasi pada era digital saat ini," katanya.

Adapun bagi badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang "informatif", Ma'ruf meminta agar terus menjaga kinerja secara optimal dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik yang semakin baik. Sementara bagi badan publik yang masih memiliki kualifikasi "cukup informatif", "kurang informatif", dan bahkan "tidak informatif" Ma'ruf berpesan agar segera melakukan perbaikan dalam manajemen keterbukaan informasi publik. ● **han**

## BKN Ungkap Kecurangan Seleksi Calon ASN 2021 di Pemkab Buol

JAKARTA (IM) - Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, ada indikasi kecurangan dalam seleksi calon aparat sipil negara (CASN) 2021 di titik lokasi (tilok) mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta didukung penuh oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan CASN 2021 untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut.

"BKN bersama BSSN menemukan adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan SKD CASN di tilok mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol," kata Satya dalam keterangan tertulis, Senin (25/10).

Indikasi BKN tersebut didukung dengan bukti berupa laporan pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan, hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi

during pelaksanaan seleksi, rekaman kamera pengawas (CCTV). Kemudian, laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan, laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol, hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol.

Satya mengatakan, BKN bersama tim Panselnas akan menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada peserta. "Dan bagi oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

BKN menegaskan, proses penyelesaian upaya indikasi kecurangan ini tidak akan menghambat tahapan seleksi berikutnya. Dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan, BKN melalui Tim Tanggap Insiden Siber BKN (BKN-CSIRT), dan Kementerian/Lembaga anggota Panselnas CASN 2021 akan melaksanakan pengawasan ketat. Secara khusus, pengawasan ini akan dilakukan kepada seluruh tilok ujian, khususnya tilok mandiri instansi. ● **han**

## Mayjen Teguh Pujo Rumecko Jadi Pangdam VI Mulawarman

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kembali memutasikan dan promosi jabatan 108 perwira tinggi (Pati). Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/943/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Kabidpennun Puspen TNI, Kolonel Laut Edys Riyanto menyampaikan, jabatan 108 pati TNI itu terdiri dari 54 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 26 Pati TNI Angkatan Laut (AL) dan 28 Pati TNI Angkatan Udara (AU).

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan mutasi dan

promosi jabatan di lingkungan TNI," ujar Edys dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10).

Dari ratusan Pati yang dimutasi yaitu Letjen TNI Tiopan Aritonang dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD. Tiopan dimutasi dalam rangka pensiun. Selain itu, terhadap jabatan Pangdam VI Mulawarman juga dilakukan mutasi. Dari yang tadinya dijabat oleh Mayjen TNI Heri Wiranto diserahkan ke Mayjen TNI Teguh Pujo Rumecko.

Heri dimutasi menjadi Pa Sahli Tk. III KSAD Bidang Japhers. Sementara Teguh jabatan sebelumnya adalah Komandan Pusat Penerbangan TNI AD (Danpuspenerbad). Kemudian, jabatan Danpuspenerbad yang ditinggalkan Teguh kini diisi Brigjen TNI Bueng Wardadi yang sebelumnya adalah Wakil Danpuspenerbad. ● **mei**



## PRESIDEN MINTA HARGA TES PCR DITURUNKAN LAGI

Petugas kesehatan membawa sampel tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) secara Drive Thru di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (26/10). Presiden Joko Widodo meminta tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu dan berlaku selama 3 x 24 jam untuk penumpang pesawat, menyusul adanya kewajiban tes PCR bagi pengguna pesawat udara.

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



**PEMAKAMAN SUDI SILALAH**  
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bersama mantan Wapres Boediono menghadiri pemakaman mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (26/10). Almarhum Sudi Silalahi meninggal dunia pada Senin (25/10) di RSPAD, Jakarta karena sakit.

## Penyidik KPK Korek Informasi Penghasilan Tersangka Dodi Alex Noerdin dari Istrinya

KPK menduga Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin mengatur lelang terkait proyek infrastruktur.

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri Bupati nonaktif Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, Erini Mutia Yufada, Senin (25/10).

Suaminya, Dodi Alex Noerdin merupakan tersangka dugaan suap proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Erini diperiksa

sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori.

"Yang didalam pengetahuan antara lain terkait dengan penghasilan tersangka DRA (Dodi Reza Alex Noerdin) selaku Bupati," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (26/10).

Selain itu, Erini akan ditanya soal adanya dugaan be-

berapa pertemuan yang turut dia hadiri terkait perkara tersebut. KPK juga akan mengonfirmasi kepada Erini sejumlah barang bukti yang disita.

Erini Mutia Yufada selesai menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada Senin (25/10) malam. Ia pun enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai materi pemeriksaan.

"Terima kasih ya, sehat-sehat ya," ucap Erini sambil berjalan keluar Gedung KPK, Senin malam.

Erini datang memenuhi pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.30 WIB, dan ke luar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.13 WIB.

Dalam kasus ini, selain Dodi

dan Herman Mayori, Kabid SDA/PPK (pejabat pembuat komitmen) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Dodi diduga dijanjikan uang Rp 2,6 miliar oleh Suhandy supaya perusahaannya memenangkan tender empat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 tersebut dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan provinsi (Bantuan Gubernur) kepada Dinas PUPR.

"Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA (Dodi Reza Alex) kepada HM (Herman), EU (Eddi Umari) dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (16/10) lalu.1).

### Rekayasa Proyek

KPK menduga Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin mengatur lelang terkait proyek infrastruktur. Adapun, pengaturan tersebut terkait proyek di Kabupaten Muba untuk tahun 2021 yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA

2021 dan Bantuan Keuangan provinsi (Bantuan Gubernur) kepada Dinas PUPR.

Dia diduga membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, ujar Alex, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Pembagiannya yaitu 10 persen untuk Dodi, 3 hingga 5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

"Total commitment fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH (Suhandy) dari empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," ucap Alex.

"Sebagai realisasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU," katanya.

Atas perbuatannya, Dodi, Herman, dan Eddi selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Suhandy selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● **han**



**PENGUATAN ANTIKORUPSI PENYELENGGARA NEGARA BERINTEGRITAS**  
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksiono Harbuwono (tengah) dan istri Mutiara Yasmin usai jumpa pers terkait program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/10). KPK memberikan penguatan integritas kepada jajaran Kemenkes sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi.

## Sudi Silalahi Tutup Usia, AHY: Beliau Senior yang Mengayomi

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbelasungkawa atas meninggalnya Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia periode 2009-2014.

Sudi Silalahi meninggal dunia pada Senin (25/10) malam di RSPAD, Jakarta. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi, Menseskab (2004-2009) dan Mensesneg RI (2009-2014) karena sakit. Saya mengenal beliau sebagai senior yang baik dan mengayomi. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan keluarganya diberi kekuatan," ujar AHY, Selasa (26/10).

Untuk diketahui, Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972, yang mengawali karier di pemerintahan dengan menjadi sekretaris Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat Menko Polkam di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya ia pernah menjabat Wakil Assospol Kasospol ABRI tahun 1996 sampai 1997, dan menjadi Kepala Staf Kodam Jaya pada tahun 1998.

Sudi Silalahi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/10). Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), Eddy Cahyono Sugarto mengatakan, jenazah mendiang diberangkatkan dari rumah duka ke TMP Kalibata sekitar pukul 13.00 WIB. "Ya di TMP Kalibata jam 13 WIB," ucap Eddy kepada wartawan, Selasa (26/10).

Berdasarkan pantauan di rumah duka, di Kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, berjejer karangan bunga mulai dari Presiden Joko Widodo

(Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, ada juga karangan bunga dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan masih banyak lagi. Kemudian, Ambulans dari Kogartap 1 telah berada di depan kediaman rumah duka tersebut sejumlah prajurit TNI yang akan melaksanakan upacara militer. ● **mei**

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Selasa - Rabu, 02 - 03 November 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 04 November 2021	11.00 s/d Selesai
Selasa - Rabu, 09 - 10 November 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 11 November 2021	11.00 s/d Selesai
Selasa - Rabu, 16 - 17 November 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 18 November 2021	11.00 s/d Selesai
Selasa - Rabu, 23 - 24 Oktober 2021	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 25 November 2021	11.00 s/d Selesai

**LOKASI OPEN HOUSE & LELANG**  
Jl. Palembang No.39 RT. 07 RW.08, Petungkana Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

**SYARAT & KETENTUAN LELANG :**

- Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar:
  - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPLP MOBIL
  - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPLP MOTOR
- Kontak kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya (as is)
- Uang jaminan dan pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Aestindo Selaras A/C no. 571999991 di BCA cab. Kya Caringin, Jakarta Pusat
- Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan menang dan uang jaminan akan hangus
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Aestindo Selaras, telp : 0812 1217 1851 (tulis) atau melalui email : yudi.darmawan@power-auction.id

Jakarta, 27 Oktober 2021  
PANITIA LELANG

## Tito Karnavian Tunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Jadi Plt Sekjen Kemendagri

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan sekjen Kemendagri pasca meninggalnya Muhammad Hudori.

"Pagi ini (Selasa), Mendagri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan, Dr. Suhajar Diantoro menjabat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI," ujar Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan pers, Selasa (26/10).

Kastorius mengatakan, upacara penyerahan SK Mendagri atas jabatan tersebut dilakukan pagi pukul 08:00 WIB di lantai 3 Gedung A Kemendagri.

Hadir semua jajaran eselon 1 JPT Madya Kemendagri, Sekretaris Utama BNPP, Rektor IPDN dan para staf khusus Mendagri.

Suhajar adalah staf ahli Menteri bidang pemerintahan yang sudah lama meng-

melintang menjabat berbagai posisi strategis di Kemendagri. Diantaranya Plt Dirjen Adwil, Rektor IPDN, Plt Sekretaris BNPP dan juga baru-baru ini menjabat Plt Gubernur Provinsi Kepri.

"Posisi sekjen harus segera diisi karena kebutuhan roda organisasi dan kebutuhan koordinasi binwas terhadap 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menunjuk Staf Ahli Menteri Sugeng Haryono, menjadi Plt Dirjen Bangda menggantikan Nur Cahya Murni yang memasuki masa pensiun 25 Oktober 2021.

Kasto mengungkapkan bahwa Mendagri meminta Plt Dirjen Bangda memberi atensi khusus di dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem di daerah.

"Mendagri meminta Plt Dirjen Bangda untuk bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil turun melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem," kata Kastorius. ● **han**

**PENGUMUMAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini, Direksi PT CICAL EDUKASI SURABAYA ("Perseroan") mengumumkan atas pengambilalihan 5176 (lima ribu seratus tujuh puluh delapan) lembar saham (Akuisisi) dalam Perseroan oleh PT Sekolah Cikal, yang menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan mengetahui hal tersebut di atas.

Jakarta, 27 Oktober 2021  
Direksi  
PT CICAL EDUKASI SURABAYA

**PENGUMUMAN**

Dengan ini kami umumkan bahwa tindakan konversi hutang Perseroan kepada DOCQUITY HOLDING PTE LTD menjadi saham dalam Perseroan yang dilakukan berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Notaris Ronaldie Christie, S.H., M.Kn, tanggal 14 Mei 2020, Nomor 2, telah selesai dilakukan.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Modal.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

PT DOCQUITY GLOBAL INDONESIA